



PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum khususnya sepanjang ketentuan yang mengatur retribusi pengendalian menara telekomunikasi maka pembangunan, penggunaan dan pengendalian menara telekomunikasi yang berpedoman pada Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informasi dan Kepala Badan Penanaman Modal Nasional Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Bersama Menara Telekomunikasi, harus memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan dan estetika lingkungan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi ;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724 );
4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725 );
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
10. Peraturan Bersama Antar Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Penanaman Modal Nasional Noor 18 Tahun

2009, Nomor 07/PRT/M/2009, tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah kabupaten Grobogan tahun 2012 Nomor 1 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAAN  
MENARA TELEKOMUNKASI

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai usur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Grobogan;
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda - tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui syatem kawat, optic, radio atau system elektromagnetik lainnya.
5. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangun - bangun untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur

fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.

6. Penyelenggara telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi atau badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
8. Pemilik menara adalah perseorangan, koperasi atau badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta yang memiliki menara untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
9. Zona cell plan atau rencana penempatan dan persebaran menara adalah batasan/ penentuan area persebaran peletakan menara berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
10. Titik cell plan adalah titik pusat jari – jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (longitude, latitude) yang membentuk zona pola persebaran menara telekomunikasi dalam sebuah radius.
11. Zona cell plan eksisting adalah zona area dalam radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara – menara telekomunikasi seluler yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini diberlakukan.
12. Zona cell plan baru adalah zona area dalam radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat area cell plan yang terdiri atas zona – zona area untuk mengakomodir kebutuhan pembangunan menara – menara baru.
13. Menara eksisting adalah menara telekomunikasi seluler yang telah berdiri dan beroperasi di Daerah sebelum diberlakukan Peraturan Bupati ini.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN  
Pasal 2

Pengendalian menara berlandaskan asas :

- a. Keselamatan;
- b. Kemanfaatan;
- c. Estetika dan keserasian dengan lingkungan sekitar;
- d. Kejelasan informasi dan identitas menara;
- e. Perlindungan kepentingan umum; dan
- f. Kepastian hukum dan keadilan.

Pasal 3

Pengendalian menara bertujuan untuk :

- a. Mengatur dan/ atau mengendalikan pembangunan menara ;
- b. Mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien dan selaras dengan lingkungannya;
- c. Mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan dan kenyamanan; dan
- d. Mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara.

BAB III  
PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Izin pembangunan menara harus didasarkan pada :
  - a. Rekomendasi kesesuaian tata ruang;
  - b. IMB; dan
  - c. Rekomendasi dokumen UKL/UPL.
- (2) Permohonan rekomendasi kesesuaian tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi kesesuaian tata ruang dengan melampirkan :

- a. Titik koordinat; dan
  - b. Denah / peta lokasi.
- (3) Rekomendasi kesesuaian tata ruang diterbitkan berdasarkan penetapan zona cell plan sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini.
  - (4) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perijinan.
  - (5) Permohonan rekomendasi dokumen UKL/UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup.

BAB IV  
PENGATURAN DAN PENATAAN  
Bagian Kesatu  
Pengaturan  
Pasal 5

Dalam rangka mengoptimalkan menara yang telah ada serta guna efisiensi, estetika lingkungan selaras dengan ketersediaan ruang di daerah, pemilik, penyedia dan/atau penyelenggara menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama – sama sesuai dengan kemampuan teknis menara.

Pasal 6

- (1) Penggunaan bersama menara oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara harus saling berkoordinasi.

## Pasal 7

- (1) Penempatan lokasi menara baru harus sesuai dengan *cell plan* sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) *Cell plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling jauh dengan radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat zona *cell plan*.
- (3) Pembangunan menara baru pada zona *cell plan* paling sedikit dipergunakan oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
- (4) Jarak lokasi menara seluler as jalan Arteri Sekunder, jalan kolektor, jalan Lokal dan jalan lingkaran sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku tentang Garis Sempadan.
- (5) Jarak Lokasi menara dengan obyek Wisata dan Kawasan Khusus paling dekat 100 (seratus) meter kecuali menara kamufase.

## Pasal 8

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 untuk kepentingan pembangunan menara yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara menara telekomunikasi yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah maupun Pemerintah Daerah untuk keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (Backbone).
- (2) Penempatan menara diluar *cell plan* dan/atau pada kawasan cagar budaya harus kamufase dan mengacu Ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Bagian Kedua  
Penataan  
Pasal 9

- (1) Penempatan menara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 didasarkan pada hal – hal sebagaimana berikut :
  - a. Kepadatan penduduk;
  - b. Kerapatan bangunan;
  - c. Jumlah sarana dan prasarana pemerintah/ perdagangan/ jasa; dan
  - d. Letak strategis.
- (2) Setiap pemilik menara wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi setiap penggunaan menara yang meliputi:
  - a. pemilik menara
  - b. Penyedia jasa konstruksi
  - c. Beban maksimum menara
  - d. Tahun pembuatan menara
  - e. Alamat menara
  - f. Koordinat geografis
  - g. Nomor IMB menara, Tanggal IMB menara
  - h. Nomor Izin Gangguan, Tanggal Izin Gangguan
  - i. Tinggi menara
  - j. Luas Area Site
  - k. Daya listrik terpasang.
- (3) Setiap menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung paling sedikit yang meliputi :
  - a. Pertanahan (grounding);
  - b. Penangkal petir;
  - c. Catu daya;
  - d. Lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);
  - e. Marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking);
  - f. Bangunan penunjangnya harus dilindungi dengan pagar keliling.



BAB V  
PERSYARATAN PEMBANGUNAN MENARA  
BARU DAN KETINGGIAN MENARA

Bagian Kesatu  
Persyaratan Pembangunan Menara Baru  
Pasal 10

Standard Baku pembangunan menara adalah sebagai berikut

- a. Ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara;
- b. Struktur menara harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama; dan
- c. Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standard baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor – faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara.

Pasal 11

- (1) Pemilik menara wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin resiko / kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara.
- (2) Pemilik menara wajib membuat surat pernyataan jaminan keselamatan dan/ atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara.
- (3) Pemilik menara harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara yang dimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukan.

Pasal 12

Pemilik menara bersama dapat memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### Pasal 13

Menara – menara yang telah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini dan telah memiliki IMB dapat menjadi menara bersama sepanjang secara teknis konstruksi memungkinkan.

### Pasal 14

- (1) Pembangunan menara hanya diperbolehkan pada :
  - a. Zona cell plan menara baru; dan/ atau
  - b. Pada zona cell plan menara eksisting ketika menara eksisting secara teknis belum dipergunakan secara maksimal.
- (2) Menara yang telah dibangun pada zona cell plan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan telah berijin dikenakan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan tata cara dan prosedur sebagaimana Lampiran III Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua

### Ketinggian Menara

### Pasal 15

- (1) Penempatan menara dipermukaan tanah dengan ketinggian paling tinggi 82 (delapan puluh dua) meter, untuk wilayah pedesaan.
- (2) Penempatan menara di permukaan tanah dengan ketinggian paling tinggi 62 (enam puluh dua) meter untuk wilayah perkotaan.
- (3) Penempatan menara diatas bangunan gedung, ketinggian paling tinggi diukur dari permukaan tanah adalah 52 (lima puluh dua) meter.

### BAB VI

### REKOMENDASI CELL PLAN

### Pasal 16

- (1) Untuk pembangunan menara wajib terlebih dahulu memiliki rekomendasi cell plan dari Dinas Perhubungan

Informasi dan Komunikasi sebagai persyaratan untuk mengurus ijin – ijin lainnya dari Pemerintah Daerah.

- (2) Rekomendasi cell plan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikeluarkan dengan mengacu pada zona cell plan sebagaimana Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini dan kajian teknis dari Tim Teknis Penempatan Menara.
- (3) Syarat administrasi permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Permohonan tertulis yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi;
  - b. Koordinat rencana pembangunan;
  - c. Rencana ketinggian menara;
  - d. Rencana bentuk menara; dan
  - e. Dokumen analisa kekuatan konstruksi menara.

## BAB VII

### TEKNIS PENEMPATAN MENARA

#### Pasal 17

- (1) Permohonan rekomendasi cell plan sebagaimana dimaksud pasal 16 diteliti dan dikaji oleh Tim Teknis Penempatan Menara yang dituangkan dalam berita acara peninjauan lokasi yang selanjutnya dijadikan usulan rekomendasi.
- (2) Tim Teknis Penempatan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tugas tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
  - a. Melakukan penelitian persyaratan administrasi dan melakukan peninjauan lokasi yang dimohon;
  - b. Memberikan pertimbangan teknis pembangunan menara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
  - c. Memberikan rekomendasi hasil penelitian dapat berupa persetujuan atau penolakan permohonan diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara hasil penelitian lokasi dan apabila dalam jangka waktu 14 (empat

belas) hari kerja tidak ada jawaban tertulis terhadap permohonan maka permohonan tersebut dianggap disetujui;

- (4) Terhitung 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya rekomendasi namun pemohon tidak menindaklanjuti dengan mengurus perijinan berikutnya maka rekomendasi tersebut batal demi hukum dan dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan pemohon yang bersangkutan.

## BAB VIII

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 18

- (1) Kegiatan pengawasan penyelenggaraan menara diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi penertiban perijinan serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan menara oleh penyedia.
- (2) Pengendalian penyelenggaraan menara meliputi penertiban pembangunan dan pemeliharaan menara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) terhadap penyelenggaraan menara dilaksanakan dalam bentuk pengenaan sanksi berupa pencabutan izin dan atau pembongkaran menara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan serta pengoperasian menara dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk Bupati berdasarkan laporan dari Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi yang menangani bidang telekomunikasi dan atau masyarakat.
- (5) Penyedia menara dilarang melakukan pembangunan fisik menara sebelum mendapat izin dari pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

- (6) Bupati melalui Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi melakukan tindakan berupa pencabutan rekomendasi apabila penyedia menara melakukan pelanggaran terhadap titik cell plan yang telah ditentukan.

#### Pasal 19

- (1) Pemilik menara wajib membongkar menara apabila menara sudah tidak laik fungsi dan atau sudah tidak beroperasi.
- (2) Pembongkaran menara dilaksanakan secara tertib dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat dan lingkungannya.
- (3) Guna kepastian pembongkaran menara dimaksud ayat (1) pemilik menara wajib menyerahkan jaminan pembongkaran menara sebesar 5 % (lima perseratus) dari biaya bangunan menara ke Kas Daerah pada saat pembangunan menara dilaksanakan.
- (4) Jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (2) diserahkan kembali apabila pemilik menara telah melakukan pembongkaran menara.
- (5) Dalam hal pembongkaran menara dilakukan oleh Pemerintah Daerah maka jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat diambil kembali oleh pemilik menara dan menjadi Pendapatan Daerah.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

- (1) Menara yang telah berdiri dan telah memiliki ijin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ditetapkan sebagai zona cell plan eksisting.
- (2) Penyedia menara yang telah memiliki IMB menara sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, namun belum membangun menaranya, maka pembangunannya

harus menyesuaikan dengan ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

- (3) Menara yang telah memiliki ijin operasional namun habis masa berlakunya pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka penyelenggara menara dapat mengajukan perpanjangan ijin dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal



Diundangkan di Purwodadi

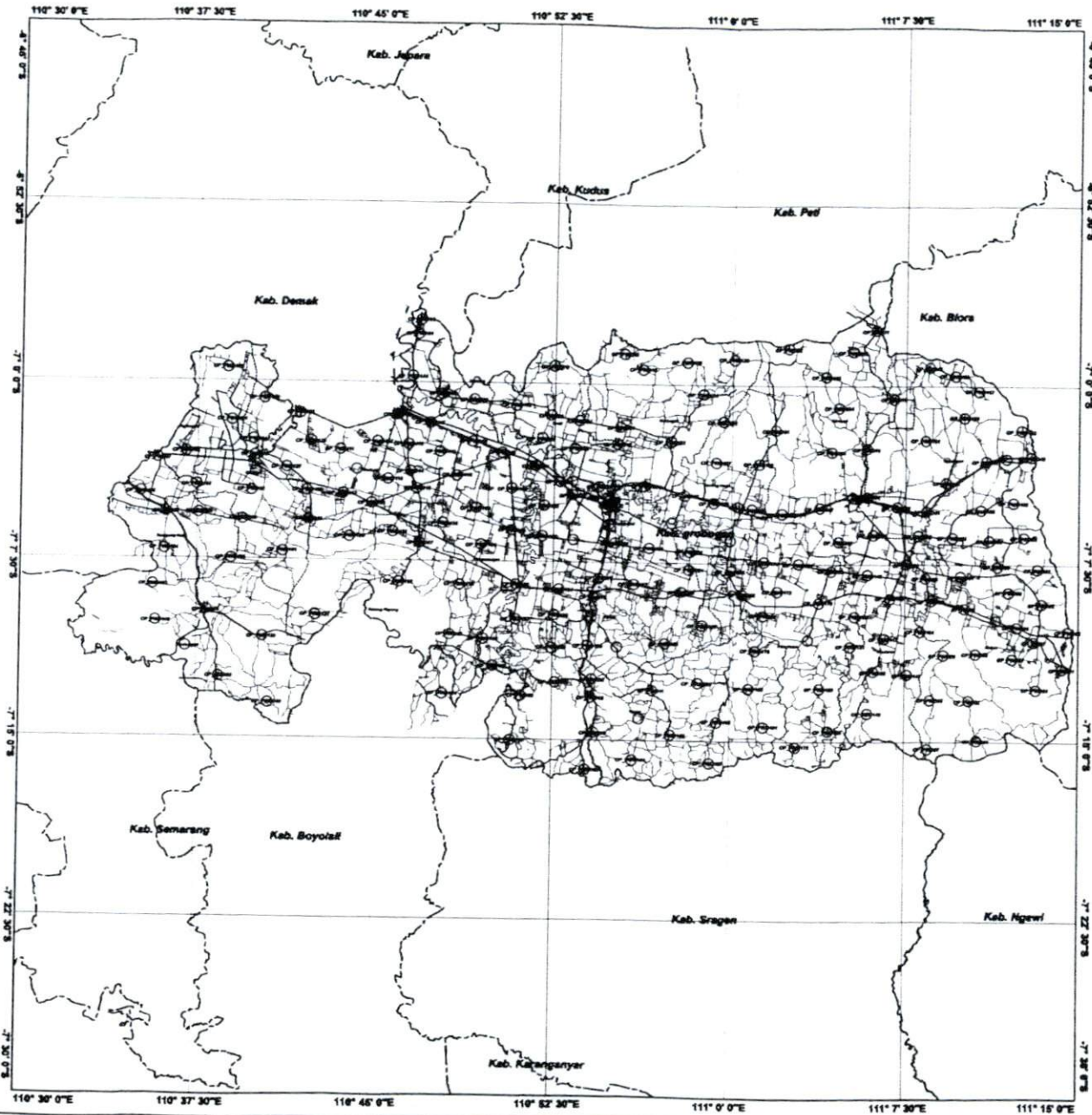
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2013 NOMOR 2

Lampiran 1 Peraturan Bupati Grobogan  
 Nomor Tahun 2014  
 Tanggal



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN  
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PETA PERSEBARAN MENARA EKSISTING

PENYUSUNAN  
 CELL PLAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA  
 DI KABUPATEN GROBOGAN  
 T.A. 2012

KETERANGAN

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| ▲ Menara Indosat      | • Ibu Kota Kecamatan      |
| ▲ Menara Axis         | □ Ibu Kota / Kabupaten    |
| ▲ Menara MitraTel     | --- Batas Admin Kecamatan |
| ▲ Menara Smartfren    | --- Batas Admin Kota/Kab  |
| ○ Menara STI          | — Jalan Lain              |
| ▲ Menara Telkomsel    | — Jalan Lokal             |
| ▲ Menara XL Axiata    | — Jalan Kolektor          |
| ▲ Menara TBG          | — Jalan Utama             |
| ▲ Menara HCPT         | — Jalur Kereta Api        |
| ▲ Menara Telkom Flexi | ○ Zona Cell Plan Existing |
|                       | ○ Zona Cell Plan New      |



Skala 1 : 110.000  
 0 13.815 27.63  
 Kilometres



ORIENTASI



KABUPATEN GROBOGAN

Sumber Peta :  
 1. Bakoourtanal  
 2. Hasil Kajian dan Analisis Teknis

Lampiran I Peraturan Bupati Grobogan  
Nomor 2 Tahun 2014  
Tanggal 4 Januari 2014

**Tabel Titik-titik Pusat Zona (Eksisting & New) Cell Plan Kabupaten Grobogan**

*Untuk Lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi Baru di Kabupaten Grobogan*

**Radius Zona adalah : 400 meter**

| no | site_no  | Longitude | Lattitude | Status    | KECAMATAN    |
|----|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1  | CP_PWD1  | 110.907   | -7.07164  | Eksisting | BRATI        |
| 2  | CP_PWD2  | 110.915   | -7.08515  | Eksisting | BRATI        |
| 3  | CP_PWD3  | 110.872   | -7.02215  | Eksisting | BRATI        |
| 4  | CP_PWD4  | 110.892   | -7.02564  | Eksisting | BRATI        |
| 5  | CP_PWD5  | 110.919   | -7.07027  | Eksisting | BRATI        |
| 6  | CP_PWD6  | 111.191   | -7.16488  | Eksisting | GABUS        |
| 7  | CP_PWD7  | 111.217   | -7.17984  | Eksisting | GABUS        |
| 8  | CP_PWD8  | 111.168   | -7.15637  | Eksisting | GABUS        |
| 9  | CP_PWD9  | 110.903   | -7.20733  | Eksisting | GEYER        |
| 10 | CP_PWD10 | 110.904   | -7.24458  | Eksisting | GEYER        |
| 11 | CP_PWD11 | 110.945   | -7.21493  | Eksisting | GEYER        |
| 12 | CP_PWD12 | 110.902   | -7.22009  | Eksisting | GEYER        |
| 13 | CP_PWD13 | 110.779   | -7.07423  | Eksisting | GODONG       |
| 14 | CP_PWD14 | 110.774   | -7.06192  | Eksisting | GODONG       |
| 15 | CP_PWD15 | 110.764   | -7.02261  | Eksisting | GODONG       |
| 16 | CP_PWD16 | 110.919   | -7.04156  | Eksisting | GROBOGAN     |
| 17 | CP_PWD17 | 110.921   | -7.02971  | Eksisting | GROBOGAN     |
| 18 | CP_PWD18 | 110.937   | -6.98991  | Eksisting | GROBOGAN     |
| 19 | CP_PWD19 | 110.923   | -6.97912  | Eksisting | GROBOGAN     |
| 20 | CP_PWD20 | 110.938   | -7.07103  | Eksisting | GROBOGAN     |
| 21 | CP_PWD21 | 110.665   | -7.06344  | Eksisting | GUBUG        |
| 22 | CP_PWD22 | 110.663   | -7.07651  | Eksisting | GUBUG        |
| 23 | CP_PWD23 | 110.665   | -7.0519   | Eksisting | GUBUG        |
| 24 | CP_PWD24 | 110.664   | -7.04043  | Eksisting | GUBUG        |
| 25 | CP_PWD25 | 110.697   | -7.02205  | Eksisting | GUBUG        |
| 26 | CP_PWD26 | 110.703   | -7.09656  | Eksisting | GUBUG        |
| 27 | CP_PWD27 | 110.781   | -7.11243  | Eksisting | KARANGRAYUNG |
| 28 | CP_PWD28 | 110.747   | -7.08471  | Eksisting | KARANGRAYUNG |
| 29 | CP_PWD29 | 110.803   | -7.17696  | Eksisting | KARANGRAYUNG |
| 30 | CP_PWD30 | 110.641   | -7.20792  | Eksisting | KEDUNGJATI   |



|    |          |         |          |           |                |
|----|----------|---------|----------|-----------|----------------|
| 31 | CP_PWD31 | 110.632 | -7.16114 | Eksisting | KEDUNGGATI     |
| 32 | CP_PWD32 | 110.818 | -7.01166 | Eksisting | KLAMBU         |
| 33 | CP_PWD33 | 110.78  | -6.95647 | Eksisting | KLAMBU         |
| 34 | CP_PWD34 | 110.779 | -6.96631 | Eksisting | KLAMBU         |
| 35 | CP_PWD35 | 110.796 | -7.00802 | Eksisting | KLAMBU         |
| 36 | CP_PWD36 | 111.14  | -7.13487 | Eksisting | KRADENAN       |
| 37 | CP_PWD37 | 111.144 | -7.15075 | Eksisting | KRADENAN       |
| 38 | CP_PWD38 | 111.102 | -7.20072 | Eksisting | KRADENAN       |
| 39 | CP_PWD39 | 111.126 | -7.12485 | Eksisting | KRADENAN       |
| 40 | CP_PWD40 | 111.215 | -7.04927 | Eksisting | NGARINGAN      |
| 41 | CP_PWD41 | 111.183 | -7.05238 | Eksisting | NGARINGAN      |
| 42 | CP_PWD42 | 111.198 | -7.05071 | Eksisting | NGARINGAN      |
| 43 | CP_PWD43 | 111.154 | -7.06742 | Eksisting | NGARINGAN      |
| 44 | CP_PWD44 | 111.14  | -7.08763 | Eksisting | NGARINGAN      |
| 45 | CP_PWD45 | 111.142 | -6.98715 | Eksisting | NGARINGAN      |
| 46 | CP_PWD46 | 110.845 | -7.10298 | Eksisting | PENAWANGAN     |
| 47 | CP_PWD47 | 110.862 | -7.05766 | Eksisting | PENAWANGAN     |
| 48 | CP_PWD48 | 110.838 | -7.04843 | Eksisting | PENAWANGAN     |
| 49 | CP_PWD49 | 110.817 | -7.04099 | Eksisting | PENAWANGAN     |
| 50 | CP_PWD50 | 110.849 | -7.14112 | Eksisting | PENAWANGAN     |
| 51 | CP_PWD51 | 111.023 | -7.16191 | Eksisting | PULOKULON      |
| 52 | CP_PWD52 | 111.008 | -7.14703 | Eksisting | PULOKULON      |
| 53 | CP_PWD53 | 111.072 | -7.13001 | Eksisting | PULOKULON      |
| 54 | CP_PWD54 | 110.971 | -7.11725 | Eksisting | PURWODADI      |
| 55 | CP_PWD55 | 110.913 | -7.09853 | Eksisting | PURWODADI      |
| 56 | CP_PWD56 | 110.918 | -7.11114 | Eksisting | PURWODADI      |
| 57 | CP_PWD57 | 110.888 | -7.07772 | Eksisting | PURWODADI      |
| 58 | CP_PWD58 | 110.879 | -7.0686  | Eksisting | PURWODADI      |
| 59 | CP_PWD59 | 110.965 | -7.14551 | Eksisting | PURWODADI      |
| 60 | CP_PWD60 | 110.657 | -7.09687 | Eksisting | TANGGUNG HARJO |
| 61 | CP_PWD61 | 111.014 | -7.08664 | Eksisting | TAWANG HARJO   |
| 62 | CP_PWD62 | 110.967 | -7.07756 | Eksisting | TAWANG HARJO   |
| 63 | CP_PWD63 | 111.039 | -6.97413 | Eksisting | TAWANG HARJO   |
| 64 | CP_PWD64 | 111.031 | -7.03088 | Eksisting | TAWANG HARJO   |
| 65 | CP_PWD65 | 111.004 | -7.08501 | Eksisting | TAWANG HARJO   |
| 66 | CP_PWD66 | 110.603 | -7.09216 | Eksisting | TEGOWANU       |
| 67 | CP_PWD67 | 110.596 | -7.05418 | Eksisting | TEGOWANU       |
| 68 | CP_PWD68 | 110.617 | -7.04962 | Eksisting | TEGOWANU       |
| 69 | CP_PWD69 | 110.626 | -7.09261 | Eksisting | TEGOWANU       |
| 70 | CP_PWD70 | 110.903 | -7.14991 | Eksisting | TOROH          |
| 71 | CP_PWD71 | 110.902 | -7.16415 | Eksisting | TOROH          |
| 72 | CP_PWD72 | 110.907 | -7.13651 | Eksisting | TOROH          |

|     |           |         |          |           |          |
|-----|-----------|---------|----------|-----------|----------|
| 73  | CP_PWD73  | 111.116 | -7.0091  | Eksisting | WIROSARI |
| 74  | CP_PWD74  | 111.097 | -7.0776  | Eksisting | WIROSARI |
| 75  | CP_PWD75  | 111.087 | -7.07814 | Eksisting | WIROSARI |
| 76  | CP_PWD76  | 111.097 | -7.04357 | Eksisting | WIROSARI |
| 77  | CP_PWD77  | 111.103 | -6.96114 | Eksisting | WIROSARI |
| 78  | CP_PWD78  | 110.874 | -6.98796 | New       | BRATI    |
| 79  | CP_PWD79  | 110.889 | -7.04512 | New       | BRATI    |
| 80  | CP_PWD80  | 110.866 | -7.03813 | New       | BRATI    |
| 81  | CP_PWD81  | 111.238 | -7.19869 | New       | GABUS    |
| 82  | CP_PWD82  | 111.223 | -7.15282 | New       | GABUS    |
| 83  | CP_PWD83  | 111.22  | -7.12824 | New       | GABUS    |
| 84  | CP_PWD84  | 111.219 | -7.21331 | New       | GABUS    |
| 85  | CP_PWD85  | 111.21  | -7.10592 | New       | GABUS    |
| 86  | CP_PWD86  | 111.205 | -7.16955 | New       | GABUS    |
| 87  | CP_PWD87  | 111.202 | -7.19182 | New       | GABUS    |
| 88  | CP_PWD88  | 111.199 | -7.14497 | New       | GABUS    |
| 89  | CP_PWD89  | 111.192 | -7.12668 | New       | GABUS    |
| 90  | CP_PWD90  | 111.186 | -7.10829 | New       | GABUS    |
| 91  | CP_PWD91  | 111.177 | -7.24902 | New       | GABUS    |
| 92  | CP_PWD92  | 111.176 | -7.18836 | New       | GABUS    |
| 93  | CP_PWD93  | 111.171 | -7.22108 | New       | GABUS    |
| 94  | CP_PWD94  | 111.165 | -7.13353 | New       | GABUS    |
| 95  | CP_PWD95  | 111.153 | -7.18916 | New       | GABUS    |
| 96  | CP_PWD96  | 111.144 | -7.22062 | New       | GABUS    |
| 97  | CP_PWD97  | 111.142 | -7.25505 | New       | GABUS    |
| 98  | CP_PWD98  | 111.242 | -7.17248 | New       | GABUS    |
| 99  | CP_PWD99  | 110.853 | -7.21931 | New       | GEYER    |
| 100 | CP_PWD100 | 110.877 | -7.20987 | New       | GEYER    |
| 101 | CP_PWD101 | 111.024 | -7.24014 | New       | GEYER    |
| 102 | CP_PWD102 | 110.899 | -7.27058 | New       | GEYER    |
| 103 | CP_PWD103 | 111.013 | -7.21337 | New       | GEYER    |
| 104 | CP_PWD104 | 110.932 | -7.2637  | New       | GEYER    |
| 105 | CP_PWD105 | 110.936 | -7.23487 | New       | GEYER    |
| 106 | CP_PWD106 | 110.991 | -7.23704 | New       | GEYER    |
| 107 | CP_PWD107 | 110.986 | -7.26557 | New       | GEYER    |
| 108 | CP_PWD108 | 110.958 | -7.24609 | New       | GEYER    |
| 109 | CP_PWD109 | 110.978 | -7.2096  | New       | GEYER    |
| 110 | CP_PWD110 | 110.846 | -7.25048 | New       | GEYER    |
| 111 | CP_PWD111 | 110.725 | -7.0471  | New       | GODONG   |
| 112 | CP_PWD112 | 110.727 | -7.07789 | New       | GODONG   |
| 113 | CP_PWD113 | 110.737 | -7.06102 | New       | GODONG   |
| 114 | CP_PWD114 | 110.751 | -7.04147 | New       | GODONG   |

|            |                  |                |                 |            |              |
|------------|------------------|----------------|-----------------|------------|--------------|
| 115        | CP_PWD115        | 110.758        | -7.06769        | New        | GODONG       |
| 116        | CP_PWD116        | 110.773        | -7.04315        | New        | GODONG       |
| 117        | CP_PWD117        | 110.788        | -7.028          | New        | GODONG       |
| 118        | CP_PWD118        | 110.795        | -7.04807        | New        | GODONG       |
| 119        | CP_PWD119        | 110.807        | -7.0648         | New        | GODONG       |
| 120        | CP_PWD120        | 110.704        | -7.04138        | New        | GODONG       |
| 121        | CP_PWD121        | 110.994        | -7.02532        | New        | GROBOGAN     |
| 122        | CP_PWD122        | 110.957        | -7.03966        | New        | GROBOGAN     |
| 123        | CP_PWD123        | 110.968        | -6.98457        | New        | GROBOGAN     |
| 124        | CP_PWD124        | 110.979        | -7.00651        | New        | GROBOGAN     |
| 125        | CP_PWD125        | 111.001        | -6.98241        | New        | GROBOGAN     |
| 126        | CP_PWD126        | 110.671        | -7.01209        | New        | GUBUG        |
| 127        | CP_PWD127        | 110.688        | -7.05996        | New        | GUBUG        |
| 128        | CP_PWD128        | 110.702        | -7.07622        | New        | GUBUG        |
| <b>129</b> | <b>CP_PWD129</b> | <b>110.645</b> | <b>-6.99085</b> | <b>New</b> | <b>GUBUG</b> |
| 130        | CP_PWD130        | 110.732        | -7.10839        | New        | KARANGRAYUNG |
| 131        | CP_PWD131        | 110.762        | -7.10467        | New        | KARANGRAYUNG |
| 132        | CP_PWD132        | 110.767        | -7.14009        | New        | KARANGRAYUNG |
| 133        | CP_PWD133        | 110.797        | -7.09821        | New        | KARANGRAYUNG |
| 134        | CP_PWD134        | 110.798        | -7.21855        | New        | KARANGRAYUNG |
| 135        | CP_PWD135        | 110.809        | -7.14171        | New        | KARANGRAYUNG |
| 136        | CP_PWD136        | 110.826        | -7.17984        | New        | KARANGRAYUNG |
| 137        | CP_PWD137        | 110.709        | -7.16405        | New        | KARANGRAYUNG |
| 138        | CP_PWD138        | 110.617        | -7.18681        | New        | KEDUNJATI    |
| 139        | CP_PWD139        | 110.672        | -7.17957        | New        | KEDUNJATI    |
| 140        | CP_PWD140        | 110.676        | -7.22621        | New        | KEDUNJATI    |
| 141        | CP_PWD141        | 110.685        | -7.11938        | New        | KEDUNJATI    |
| 142        | CP_PWD142        | 110.596        | -7.16909        | New        | KEDUNJATI    |
| 143        | CP_PWD143        | 110.848        | -7.0155         | New        | KLAMBU       |
| 144        | CP_PWD144        | 110.775        | -6.99547        | New        | KLAMBU       |
| 145        | CP_PWD145        | 111.127        | -7.20292        | New        | KRADENAN     |
| 146        | CP_PWD146        | 111.114        | -7.14933        | New        | KRADENAN     |
| 147        | CP_PWD147        | 111.11         | -7.17746        | New        | KRADENAN     |
| 148        | CP_PWD148        | 111.098        | -7.23009        | New        | KRADENAN     |
| 149        | CP_PWD149        | 111.098        | -7.13231        | New        | KRADENAN     |
| 150        | CP_PWD150        | 111.089        | -7.16212        | New        | KRADENAN     |
| 151        | CP_PWD151        | 111.086        | -7.18347        | New        | KRADENAN     |
| 152        | CP_PWD152        | 111.07         | -7.24249        | New        | KRADENAN     |
| 153        | CP_PWD153        | 111.064        | -7.21298        | New        | KRADENAN     |
| 154        | CP_PWD154        | 111.136        | -7.17273        | New        | KRADENAN     |
| 155        | CP_PWD155        | 111.203        | -7.08153        | New        | NGARINGAN    |
| 156        | CP_PWD156        | 111.18         | -7.08666        | New        | NGARINGAN    |

|     |           |         |          |     |               |
|-----|-----------|---------|----------|-----|---------------|
| 157 | CP_PWD157 | 111.178 | -7.00363 | New | NGARINGAN     |
| 158 | CP_PWD158 | 111.167 | -7.02202 | New | NGARINGAN     |
| 159 | CP_PWD159 | 111.16  | -6.99303 | New | NGARINGAN     |
| 160 | CP_PWD160 | 111.159 | -7.10634 | New | NGARINGAN     |
| 161 | CP_PWD161 | 111.14  | -7.03797 | New | NGARINGAN     |
| 162 | CP_PWD162 | 111.135 | -7.10477 | New | NGARINGAN     |
| 163 | CP_PWD163 | 111.208 | -7.03066 | New | NGARINGAN     |
| 164 | CP_PWD164 | 110.824 | -7.11319 | New | PENAWANGAN    |
| 165 | CP_PWD165 | 110.833 | -7.19864 | New | PENAWANGAN    |
| 166 | CP_PWD166 | 110.845 | -7.07344 | New | PENAWANGAN    |
| 167 | CP_PWD167 | 110.849 | -7.16587 | New | PENAWANGAN    |
| 168 | CP_PWD168 | 110.867 | -7.10695 | New | PENAWANGAN    |
| 169 | CP_PWD169 | 110.82  | -7.0874  | New | PENAWANGAN    |
| 170 | CP_PWD170 | 111.055 | -7.1788  | New | PULOKULON     |
| 171 | CP_PWD171 | 111.048 | -7.12495 | New | PULOKULON     |
| 172 | CP_PWD172 | 111.047 | -7.25411 | New | PULOKULON     |
| 173 | CP_PWD173 | 111.033 | -7.14465 | New | PULOKULON     |
| 174 | CP_PWD174 | 111.023 | -7.12378 | New | PULOKULON     |
| 175 | CP_PWD175 | 111.017 | -7.18673 | New | PULOKULON     |
| 176 | CP_PWD176 | 111     | -7.13025 | New | PULOKULON     |
| 177 | CP_PWD177 | 110.999 | -7.109   | New | PULOKULON     |
| 178 | CP_PWD178 | 111.063 | -7.15252 | New | PULOKULON     |
| 179 | CP_PWD179 | 110.889 | -7.10926 | New | PURWODADI     |
| 180 | CP_PWD180 | 110.942 | -7.11469 | New | PURWODADI     |
| 181 | CP_PWD181 | 110.971 | -7.12984 | New | PURWODADI     |
| 182 | CP_PWD182 | 110.868 | -7.08545 | New | PURWODADI     |
| 183 | CP_PWD183 | 110.594 | -7.14351 | New | TANGGUNGHARJO |
| 184 | CP_PWD184 | 110.602 | -7.11833 | New | TANGGUNGHARJO |
| 185 | CP_PWD185 | 110.649 | -7.12466 | New | TANGGUNGHARJO |
| 186 | CP_PWD186 | 110.584 | -7.07784 | New | TANGGUNGHARJO |
| 187 | CP_PWD187 | 110.989 | -7.05407 | New | TAWANGHARJO   |
| 188 | CP_PWD188 | 110.987 | -7.0824  | New | TAWANGHARJO   |
| 189 | CP_PWD189 | 110.958 | -7.09677 | New | TAWANGHARJO   |
| 190 | CP_PWD190 | 111.019 | -7.05486 | New | TAWANGHARJO   |
| 191 | CP_PWD191 | 110.649 | -7.02739 | New | TEGOWANU      |
| 192 | CP_PWD192 | 110.624 | -7.07256 | New | TEGOWANU      |
| 193 | CP_PWD193 | 110.876 | -7.16244 | New | TOROH         |
| 194 | CP_PWD194 | 110.879 | -7.14434 | New | TOROH         |
| 195 | CP_PWD195 | 110.9   | -7.1837  | New | TOROH         |
| 196 | CP_PWD196 | 110.92  | -7.18456 | New | TOROH         |
| 197 | CP_PWD197 | 110.932 | -7.14036 | New | TOROH         |
| 198 | CP_PWD198 | 110.954 | -7.182   | New | TOROH         |

|     |           |         |          |     |          |
|-----|-----------|---------|----------|-----|----------|
| 199 | CP_PWD199 | 110.98  | -7.16902 | New | TOROH    |
| 200 | CP_PWD200 | 110.874 | -7.18566 | New | TOROH    |
| 201 | CP_PWD201 | 111.102 | -7.10421 | New | WIROSARI |
| 202 | CP_PWD202 | 111.086 | -6.97611 | New | WIROSARI |
| 203 | CP_PWD203 | 111.077 | -7.1091  | New | WIROSARI |
| 204 | CP_PWD204 | 111.076 | -7.01507 | New | WIROSARI |
| 205 | CP_PWD205 | 111.071 | -7.04618 | New | WIROSARI |
| 206 | CP_PWD206 | 111.067 | -6.99356 | New | WIROSARI |
| 207 | CP_PWD207 | 111.063 | -7.08535 | New | WIROSARI |
| 208 | CP_PWD208 | 111.036 | -7.08968 | New | WIROSARI |
| 209 | CP_PWD209 | 111.119 | -7.08447 | New | WIROSARI |

Ditetapkan di Grobogan  
pada tanggal 4 - 1 - 2014

BUPATI GROBOGAN,  
  
BAMBANG PUDJIONO

Lampiran III : Peraturan Bupati Grobogan  
Nomor : 2 Tahun 2014  
Tentang : Prosedur tata cara pembayaran  
retribusi pengendalian menara  
telekomunikasi

---

## PROSEDUR TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

### A. DASAR HUKUM

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012, tentang Retribusi Jasa Umum, khususnya untuk Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, pasal 107 ayat (2) mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pengendalian menara telekomunikasi di tetapkan sebesar 2 % ( dua persen ) dari Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan ( NJOP PBB ) Menara Telekomunikasi.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1. Maksud

Untuk memberikan petunjuk tentang tata cara pembayaran retribusi pengendalian menara Telekomunikasi di Kabupaten Grobogan.

#### 2. Tujuan

- a. Memberikan kemudahan bagi wajib retribusi, menara telekomunikasi dalam memenuhi kewajibannya.
- b. Untuk mempercepat penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- c. Untuk peningkatan pelayanan administrasi pengelola retribusi daerah

### C. PRINSIP PEMUNGUTAN RETRIBUSI

1. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut dengan menggunakan SKRD ( Surat Ketetapan Retribusi Daerah ) atau dokumen lain yang di sahkan.
2. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar.

#### D. MEKANISME PEMBAYARAN RETRIBUSI

1. Wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi, melakukan pembayaran berdasarkan SKRD ( Surat Keputusan Retribusi Daerah ) dari Dinas Perhubungan , Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan.
2. Retribusi terutang wajib di bayar lunas, ke kas daerah melalui Bank Jateng cabang Purwodadi ke rekening penerima kas daerah nomor 1.017.000.01.
3. Bank tempat pembayaran yang ditunjuk wajib menandatangani SSRD ( Surat Setoran Retribusi Daerah ) atau dokumen lain yang sah sebagai bukti pengesahan atas pembayaran retribusi yang dilakukan oleh wajib retribusi dan dibayar tepat waktu.
4. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
5. Wajib retribusi menerima bukti, Surat Setoran Retribusi Daerah ( SSRD ) atau dokumen lain yang sah dari bank.
6. Format SKRD ( Surat Ketetapan Retribusi Daerah ) dan SSRD ( Surat Setoran Retribusi Daerah ) sebagaimana terlampir dalam prosedur dan tata cara pembayaran retribusi daerah.

#### E. PELAPORAN

1. Pelaporan dilaksanakan oleh wajib retribusi atas pembayaran retribusi ke Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan dengan menggunakan SKRD/SSRD yang telah di validasi oleh bank.
2. Bank Jateng melaporkan penerimaan pembayaran ke kas daerah dan ke Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan dengan lembar SKRD/SSRD ( lembar ke 2 dan 3 ).
3. Pelaporan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan dan tunggakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

F. PENUTUP

Demikian prosedur dan tata cara pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi untuk di jadikan pedoman pelaksana pemungutan retribusi.

The stamp is circular with a purple ink. It features a central emblem of a Garuda, the national symbol of Indonesia. The text "KABUPATEN GROBOGAN" is written around the perimeter of the circle. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.  
BUPATI GROBOGAN,  
BAMBANG PUDJIONO